



E-GOVERNMENT

**Konsep, Implementasi
dan Perkembangannya
di Indonesia**



Etin Indrayani



e-Government
**Konsep, Implementasi dan
Perkembangannya di
Indonesia**

ETIN INDRAYANI

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan
Balai Insan Cendikia
2020

e-Government: Konsep, Implementasi dan Perkembangannya di Indonesia

Etin Indrayani

Copyright © 2020 by Etin Indrayani

Diterbitkan oleh:

LPP Balai Insan Cendekia

Jl. Lintas Sumatra Solok-Padang KM. 8 Bukit Kili Koto Baru
Kabupaten Solok – Sumatera Barat

Tel +62813 7272 5118

Tel +62822 6890 0329

Email : penerbitbic@gmail.com

Website : www.insancendekiamandiri.co.id

: www.adhanmedia.id

Penyunting : Tim Insan Cendekia

Tata letak : @Teamminang

Desain Cover : Adhan Chaniago

vii, 398 hlm, 14,8 × 21 cm

Cetakan pertama, Februari 2020

Terbit : Februari, 2020

ISBN : 978-623-7710-29-5

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal 72.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan bentuk dan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Prakata

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas petunjuk dan rahmat serta karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku ini dengan judul ***e-Government (Konsep, Implementasi dan Perkembangannya di Indonesia)***. Penyusunan buku ini dimaksudkan untuk memenuhi keterbatasan literatur yang terkait dengan pemenuhan sumber rujukan mata kuliah *e-government*.

Pemerintahan di seluruh dunia pada saat ini menghadapi "tekanan" dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pemberian informasi bagi masyarakat serta dituntut untuk lebih efektif. Hal tersebut menyebabkan *e-government* atau pemerintahan berbasis elektronik semakin berperan penting bagi semua pengambil keputusan. Pemerintah tradisional (Traditional government) yang identik dengan paper-based administration mulai ditinggalkan.

Kecenderungan pemakaian teknologi digital dalam organisasi publik saat ini tidak dapat dihindari lagi. Untuk itu, konsep digital e-government atau yang dikenal dengan istilah e-government harus dipersiapkan secara matang, agar dapat menghindari terjadinya kegagalan dan penurunan kinerja layanan. Penggunaan teknologi internet diharapkan dapat menjadi wahana untuk mempercepat pertukaran informasi, menyediakan sarana layanan dan kegiatan transaksi dengan warga masyarakat (G2C), pelaku bisnis (G2B), dan tentunya dengan pihak pemerintah sendiri (G2G). Dalam hal ini, konsep transformasi adalah hal utama yang harus diterapkan, bukan sekedar pemakaian teknologinya saja, melainkan pemanfaatan teknologi yang dapat mendukung dalam sistem pembuatan kebijakan dan pelayanan publik ke arah yang lebih baik.

Penerapan inisiatif *e-government* telah menyebar di Indonesia dengan tingkat keberhasilan yang beragam. Usaha pencapaian tujuan hasil akhir penerapan konsep ini harus memperhatikan dua hal, yaitu: proses transformasi elektronik dalam organisasi, serta dampak-dampak ikutannya. Di Indonesia, konotasi tentang *e-government* merujuk pada penggunaan komputer dalam prosedur pelayanan yang diselenggarakan oleh organisasi pemerintah. Transformasi *tradisional government* menjadi

electronic government (e-government) menjadi salah satu isu kebijakan publik yang terus dikembangkan. Dalam khazanah internasional, *e-government* lebih merujuk kepada teknologi yang sudah tersedia secara luas di negara-negara maju, yaitu teknologi internet. Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* yang diikuti dengan Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *e-government* Lembaga dari Kementerian Kominfo, maka sejak saat itu pemerintah Republik Indonesia secara resmi mulai menerapkan *e-government*.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa buku yang tersaji ini relatif masih jauh dari tingkat kesempurnaannya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat konstruktif selalu terbuka demi penyempurnaan buku di masa yang akan datang. Disisi lain terbersit harapan, mudah-mudahan buku ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Jatinangor, Desember 2019

Penulis

Daftar Isi

Prakata	iii
Daftar Isi.....	vi
Pendahuluan:Pemerintah yang terbuka (<i>Open Government</i>) dan Pelayanan Publik ke depan	1
Prinsip-Prinsip <i>e-Government</i>	17
Model <i>e-Government</i>	45
Manfaat <i>e-Government</i> bagi <i>Stakeholder</i>	75
Dampak <i>e-Government</i> Bagi Keterbukaan dan Pemberantasan Korupsi	99
Implementasi <i>e-Government</i> di Indonesia	139
Pedoman Sukses Implementasi Proyek <i>e-Government</i> ..	171
e-Parlemen dan Legislasi Berbasis Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK)	211
Kerangka & Metodologi Penilaian Dampak <i>e-Government</i>	247
Pedoman Desain & Implementasi Portal <i>e-Government</i>	277
<i>Best Practice e-Government</i> di Dunia dan di Indonesia (Pemerintah dan Pemerintah Daerah)	325

Penutup	381
Daftar Pustaka	385
Tentang Penulis.....	397

Tentang Penulis

Penulis, Etin Indrayani dilahirkan di Porsea pada tanggal 1 Oktober 1966. Pendidikan formal penulis dilalui di SDN Paya Pasir Medan, SMPN 5 Kampung Besar Medan, dan SMAN Labuhandeli (SMAN 9) Medan. Pada tahun 1990, penulis menamatkan pendidikan S1 Jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Pada Tahun 1995 menyelesaikan pendidikan S2 Teknik dan Manajemen Industri (TMI) Institut Teknologi Bandung (ITB). Penulis selanjutnya menempuh pendidikan program doktor (S3) pada Program Studi Administrasi Pendidikan dengan bidang kekhususan Sistem Informasi Pendidikan, Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia sejak tahun 2006 sd. Maret 2011.

Sejak Tahun 2001, penulis tercatat sebagai staf pengajar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor dengan jabatan akademik saat ini adalah Lektor Kepala.

Buku yang pernah ditulis dan diterbitkan antara lain Panduan Pelatihan e-government Tahun 2006 diterbitkan oleh PT Tjarati Bandung, dan Memahami Asas Tugas Pembantuan: Pandangan Teoritis dan Implementasi (bersama Prof Sadu Wasistiono dan Andi Pitono, S.Sos., M.Si) diterbitkan oleh Fokusmedia Tahun 2008. Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan : Konsep dan Aplikasi pada Organisasi Pemerintahan Daerah diterbitkan oleh IPDN Press pada tahun 2014.

Penerapan *e-government (electronic government)* merupakan bentuk dari implementasi penggunaan teknologi informasi bagi pelayanan pemerintah kepada publik. Alasan utama - mengimplementasikan *e-government* : *e-government* meningkatkan efisiensi (*e-government improves efficiency*) · *e-government* memperbaiki kualitas pelayanan (*e-government improves service quality*) · *e-government* membantu mencapai keluaran kebijakan yang lebih baik (*e-government helps achieve policy outcomes*) · *e-government* berkontribusi dalam mencapai tujuan ekonomi (*e-government contributes to achieving economic objectives*) · *e-government* dapat menjadi kontributor utama dalam pelaksanaan reformasi (*e-government can be the major contributor to reform*) · *e-government* membangun kepercayaan antara pemerintah dan warga negara/citizens (*builds trust between citizens and government*) Penggerak utama *e-government* adalah untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelayanan dan dampak dari kebijakan. Fokus telah bergeser pada tujuan lain yaitu perbaikan pelayanan, peningkatan akuntabilitas, peningkatan fasilitasi kepada stakeholder. Namun dalam prakteknya seringkali terjadi perbedaan pemahaman, cara pandang dan penerapan *e-government* telah menimbulkan distorsi serta penyimpangan atas maksud pembuatan *e-government* itu sendiri.

Kondisi memprihatinkan ini terjadi diberbagai tingkatan birokrasi, baik dari tingkat staf paling bawah hingga ke tingkat paling tinggi. Pengembangan aplikasi *e-government* memerlukan pendanaan yang cukup besar sehingga diperlukan kesiapan dari sisi sumber daya manusia, aparat pemerintahan dan kesiapan dari masyarakat. Ketidaksiapan sumber daya manusia, budaya organisasi, sarana dan prasarana teknologi informasi (infrastruktur), serta kurangnya perhatian dari pihak-pihak yang terlibat langsung dapat menjadi penyebab kegagalan dalam menerapkan *e-government*. Akan tetapi salah satu isu yang berkembang saat ini terkait dengan penerapan *e-government* di Indonesia adalah kurang optimalnya produk-produk Teknologi Informasi (TI) di lingkungan pemerintah dan upaya implementasi *e-government* yang kurang bersinergi.



Penerbit Insan Cendekia Mandiri
Perum BTI No. 53, Solok – Sumbar
Email : redaksi.icm@gmail.com
Website : www.insancendekiamandiri.co.id

